

Nama: Ria Yulia  
NIM: 09031181722028  
Kelas: Sistem Informatika Reguler 4B

## Quantitative Research

### 1. Framing national REDD+ benefits, monitoring, governance and finance: A comparative analysis of seven countries Marjanneke J. Vijgea,\*, Maria Brockhausb, Monica Di Gregoriob,c, Efrian Muharromb (2016)

Global Environmental Change 39 (2016) 57–68

Contents lists available at ScienceDirect  
Global Environmental Change  
journal homepage: www.elsevier.com/locate/gloenvcha

Framing national REDD+ benefits, monitoring, governance and finance: A comparative analysis of seven countries

Marjanneke J. Vijgea<sup>a,\*</sup>, Maria Brockhaus<sup>b</sup>, Monica Di Gregorio<sup>b,c</sup>, Efrian Muharrom<sup>b</sup>

<sup>a</sup>Environmental Policy Group, Department of Social Sciences, Wageningen University & Research Centre, Hollandseweg 1, 6706 KN Wageningen, The Netherlands  
<sup>b</sup>Center for International Forestry Research, P.O. Box 0113 BOCEB, Bogor 16000, Indonesia  
<sup>c</sup>University of Leeds, School of Earth and Environment, Sustainability Research Institute, Leeds LS 29JT, United Kingdom

Article history:  
Received 6 August 2015  
Received in revised form 17 January 2016  
Accepted 16 April 2016  
Available online xxx

Keywords:  
REDD+  
Comparative discourse analysis  
Co-benefits  
Market-based approach  
MRV  
Centralization

ABSTRACT

This article analyzes how and with what possible consequences REDD+ is framed in the national policy arena in Cameroon, Indonesia, Nepal, Papua New Guinea, Peru, Tanzania, and Vietnam. It analyzes the most prominent views and storylines around key REDD+ design features among policy actors and in policy documents. We focus on storylines related to four questions, namely: (1) What should REDD+ achieve: carbon or also non-carbon objectives? (2) Who should monitor REDD+ outcomes: only technical experts or also local communities? (3) At what level should REDD+ be governed: at national or sub-national level? and (4) How should REDD+ be financed: through market- or fund-based sources? The vast majority of policy actors and policy documents frame REDD+ as a mechanism that should also realize non-carbon benefits, yet non-carbon monitoring receives very little attention. In all but one country, policy documents contain plans to involve local communities in the design and/or execution of measuring, reporting and verifying REDD+ outcomes. With regard to the level at which REDD+ should be governed, while most policy documents contain elements of a nested approach to accounting, almost all countries envision a long-term transition to national accounting and benefit distribution. We found strikingly little discussion among policy actors and in policy documents of how to finance REDD+ and

#### Kesimpulan:

Dalam domain kebijakan yang muncul seperti REDD +, analisis wacana dapat memberikan wawasan mendalam ke arah suatu kebijakan tertentu mengambil dan (mungkin) konsekuensi dari pelembagaan wacana atau alur cerita tertentu. Melalui analisis yang menonjol jalan cerita, artikel ini menunjukkan karbonisasi hutan tata kelola, dimana manfaat non-karbon seperti penyediaan penghidupan lokal dan konservasi keanekaragaman hayati diabaikan, tetap menjadi kemungkinan di sebagian besar negara REDD + yang diteliti sini. Yang mengatakan, analisis kami menunjukkan bahwa negara-negara di tahap selanjutnya kesiapan REDD + menjabarkan kebijakan yang lebih rinci untuk perlindungan atau mempromosikan nilai-nilai non-karbon hutan dalam ER-PIN mereka.

### 2. Evaluating IT governance practices and business and IT outcomes: a quantitative exploratory study in Brazilian companies

Available online at www.sciencedirect.com  
ScienceDirect  
Procedia Technology 103 (2016) 489–497

CENTERIS 2014 - Conference on ENTERprise Information Systems / ProjMAN 2014 - International Conference on Project Management / HESIT 2014 - International Conference on Health and Social Care Information Systems and Technologies

Evaluating IT governance practices and business and IT outcomes: A quantitative exploratory study in Brazilian companies

Paulo Henrique de Souza Boregas<sup>a,\*</sup>, Adriano Olimpio Tonello<sup>b</sup>, André Luiz Zambakki<sup>c</sup>, Pamela Aparecida dos Santos<sup>c</sup>, Larissa Zappo<sup>d</sup>

<sup>a</sup>Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Matemática, Estatística e Física, Caixa Postal 685, Rio de Janeiro, Brazil  
<sup>b</sup>Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Matemática, Estatística e Física, Caixa Postal 685, Rio de Janeiro, Brazil  
<sup>c</sup>Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Matemática, Estatística e Física, Caixa Postal 685, Rio de Janeiro, Brazil  
<sup>d</sup>Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Matemática, Estatística e Física, Caixa Postal 685, Rio de Janeiro, Brazil

Abstract

Information technology (IT) governance is an important organizational ability to generate IT business strategy alignment and IT value delivery to the organization. For this purpose, IT governance involves the creation of a business strategy aligned with the organization's mission, processes and different capabilities. However, the specific contribution of these different practices remains poorly understood. This paper presents the results of a study that sought to (1) describe a conceptual approach for IT governance practices and their effects on business and IT outcomes; (2) identify different organizational practices adopted by IT providers, business units, and users; (3) analyze data from a sample of 10 Brazilian companies; (4) analyze and discuss whether these approaches to IT governance align with the organization's strategy; (5) identify the relationship between IT governance and IT outcomes; and (6) identify the relationship between IT governance and business outcomes. The findings have implications for the evaluation of IT governance practices, and it provides practical guidelines based on empirical evidence from IT governance studies.

© 2016 The Authors. Published by Elsevier Ltd. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license. http://dx.doi.org/10.1016/j.procs.2016.04.002

\* Corresponding author. E-mail address: boregas@imfe.ufrj.br (P.H. de Souza Boregas).

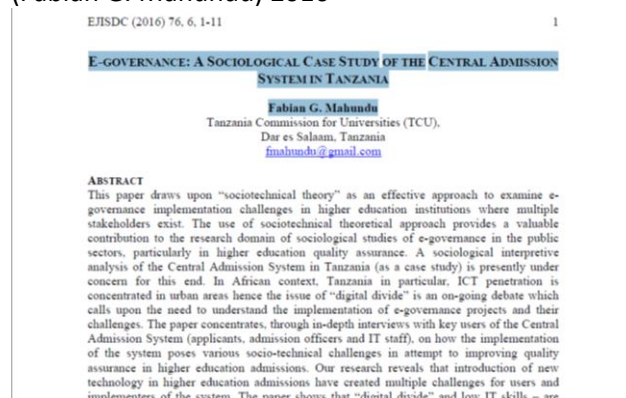
1878-7820/\$ – see front matter © 2016 Elsevier B.V. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license. http://dx.doi.org/10.1016/j.procs.2016.04.002

Kesimpulan:

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pengetahuan bisnis dan mekanisme relasional adalah komponen utama kinerja TI dan bisnis yang unggul. Kesimpulan ini didukung oleh cluster dengan kinerja superior (klaster 1) di mana mekanisme relasional dan skor pengetahuan bisnis berada di atas rata-rata sampel. Proses dan struktur untuk tata kelola TI, di sisi lain, tidak selalu mengarah pada kinerja yang unggul. Temuan ini adalah terlihat jelas pada klaster 2, di mana, meskipun tingkat kematangan yang unggul dalam proses dan struktur, tidak ada yang superior kinerja dalam IT atau bisnis. Karena itu, memiliki hasil positif untuk kedua mekanisme ini tidak harus menyiratkan keberhasilan dalam kinerja bisnis atau TI. Sejalan dengan penelitian sebelumnya [23], temuan kami memberikan bukti lebih lanjut tentang pentingnya mekanisme relasional dalam mempromosikan keselarasan antara TI dan bisnis, termasuk praktik-praktik yang mempromosikan sinergi antara manajemen senior, TI, dan bidang organisasi lainnya. Strategi bisnis harus diselaraskan dengan TI pengambilan keputusan, memadukan keterampilan staf, baik dalam bisnis dan TI. Keputusan TI yang dibuat oleh manajer memengaruhi keseluruhan perusahaan; jika tata kelola TI direncanakan dengan baik, ini memberikan proses pengambilan keputusan yang jelas dan transparan, menghasilkan perilaku yang konsisten dan diinginkan dan laba organisasi [12, 18]. Penelitian ini menyarankan bahwa faktor relasional mekanisme (F5) dan pengetahuan bisnis (F6) sangat penting untuk menyediakan organisasi dan TI yang memuaskan kinerja, seperti yang dapat dilihat dari cluster.

## Qualitative Research

### 1. E-GOVERNANCE: A SOCIOLOGICAL CASE STUDY OF THE CENTRAL ADMISSION SYSTEM IN TANZANIA (Fabian G. Mahundu) 2016

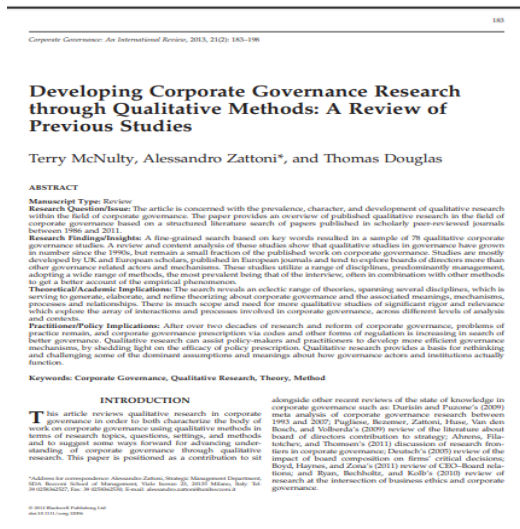


Kesimpulan:

Studi kami mengakui keberadaan kesenjangan digital sebagai yang terkemuka dan menonjol tantangan dalam pelaksanaan CAS dan umumnya tampaknya menjadi hal yang umum di sebagian besar proyek-proyek e-governance Afrika. Karena itu, penelitian ini menemukan bahwa kesadaran lebih pada yang baru sistem penerimaan untuk calon pelamar pendidikan tinggi tidak bisa dihindari. Selain itu, pelatihan bagi mereka yang bekerja dengan CAS terutama petugas penerimaan sangat penting untuk kelayakan menjalankan sistem. Secara umum, ada banyak kerangka kerja evaluasi dalam literatur yang dapat digunakan untuk itu menilai implementasi inisiatif e-governance. Untuk tujuan penelitian ini, Teori sistem sosioteknik ditemukan signifikan dalam memeriksa implementasi tantangan sistem penerimaan pusat dalam pengaturan multi-level yang kompleks. Kerangka kerja berkonsentrasi pada berbagai aktor yang tersedia dalam berbagai sistem (sosial, teknis dan kelembagaan). Tujuan inti makalah ini adalah untuk menguji implementasi tantangan sosioteknik dari Sistem Penerimaan Pusat dalam konteks pendidikan tinggi jaminan kualitas di Tanzania. Studi lebih lanjut dapat dilakukan dari studi saat ini untuk

menilai pengaruh pengembang sistem dalam penggunaan layanan mikroelektronika dalam peraturan lainnya agensi.

## 2. Developing Corporate Governance Research through Qualitative Methods: A Review of Previous Studies



### Kesimpulan :

Artikel ini bertujuan menyajikan karakteristik utama PT penelitian kualitatif dan analisis kualitatif sebelumnya studi tentang topik tata kelola perusahaan. Pada waktu bersamaan, artikel ini mendorong para sarjana tata pemerintahan untuk menyerahkan artikel kualitatif yang ketat dan relevan untuk CGIR (dan lainnya jurnal) sehingga berkontribusi pada pengembangan teori mampu menjelaskan dengan teliti fenomena tata kelola perusahaan di seluruh dunia dan untuk memberikan solusi yang efektif bagi para praktisi. Studi kualitatif dapat membantu para sarjana tata kelola 194 TATA KELOLA PERUSAHAAN Volume 21 Nomor 2 Maret 2013 © 2012 Blackwell Publishing Ltd mengatasi masalah ini karena mereka memberikan pengetahuan yang kaya dan mendalam tentang fenomena yang diselidiki. Eklektik sifat studi kualitatif dapat membantu para sarjana tata kelola menggunakan teori pelengkap dan alternatif (dengan teori agensi dominan) sehingga menghasilkan yang baru dan inovatif interpretasi fenomena tata kelola perusahaan. Apalagi keterlibatan para peneliti di dunia nyata situasi dapat membantu para sarjana tata pemerintahan untuk mendapatkan yang lebih dalam pemahaman tentang hubungan di antara mata pelajaran utama (investor, direktur, regulator, dan manajer) dan dari proses yang mengarah ke pengambilan keputusan. Singkatnya, peningkatan penggunaan metode kualitatif yang ketat akan memimpin tata kelola sarjana untuk memperluas teori dan metodologis ruang lingkup proyek penelitian mereka untuk memperkuat mereka kontribusi terhadap pengembangan teori global tata kelola perusahaan komparatif

analisis :

data quantitative : bersifat pembuktian metode pengumpulan data biasanya menggunakan eksperimen.

Pada paper 1 dan 2 menggunakan kata quantitative, pada kedua paper tersebut untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dibutuhkan pengujian langsung,

Paper 1 melakukan pengujian dengan melakukan eksperimen dan melalui analisis yang menonjol jalan cerita, artikel ini menunjukkan karbonisasi hutan tata kelola, dimana manfaat non-karbon seperti penyediaan penghidupan lokal dan konservasi keanekaragaman hayati diabaikan, tetap menjadi kemungkinan di sebagian besar negara REDD + yang diteliti sini.

paper 2 melakukan pengujian dengan melakukan praktik-praktik untuk mengembangkan IT dan bisnis, serta mencegah Strategi bisnis harus diselaraskan dengan TI pengambilan keputusan, memadukan keterampilan staf, baik dalam bisnis dan TI. Keputusan TI yang dibuat oleh manajer memengaruhi keseluruhan perusahaan; jika tata kelola TI direncanakan dengan baik, ini memberikan proses pengambilan keputusan yang jelas dan transparan, menghasilkan perilaku yang konsisten dan diinginkan dan laba organisasi , namun dampak buruknya adalah kurangnya komunikasi

data qualitative : lebih bersifat pengujian dan pengembangan maka pengumpulan data bisa dengan wawancara.

Pada paper 1 dan 2 melakukan pengujian dengan mengadakan wawancara atau tanya jawab agar bisa mendapatkan data yang diperlukan

Paper 1 melakukan pengujian dengan melakukan wawancara atau pendataan , agar menemukan kesadaran lebih pada sistem penerimaan yang baru untuk calon pelamar pendidikan tinggi tidak bisa dihindari. Selain itu, pelatihan bagi mereka yang bekerja dengan CAS terutama petugas penerimaan sangat penting untuk kelayakan menjalankan sistem.

Paper 2 melakukan pengujian agar para sarjana tata pemerintahan untuk menyerahkan artikel kualitatif yang ketat dan relevan untuk CGIR (dan lainnya jurnal) sehingga berkontribusi pada pengembangan teori mampu menjelaskan dengan teliti fenomena tata kelola perusahaan di seluruh dunia dan untuk memberikan solusi yang efektif bagi para praktisi.